

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki potensi untuk mencapai visi misinya di masa depan. Namun, Indonesia masih berfokus pada permasalahan terkait pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan sebagai landasan utamanya. Faktor yang menjadi penghambat adalah rendahnya capaian rata-rata akademik yang dicapai oleh siswa Indonesia (Oliver Wyman, 2023). Tantangan dalam hal akademik ini ditunjukkan oleh beberapa temuan internasional yang mengungkapkan skor Indonesia yang masih di bawah rata-rata.

Pertama, pada data dari hasil Programme for International Student (PISA) 2018, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), diikuti oleh negara-negara di dunia, menunjukkan bahwa skor anak-anak Indonesia pada bidang literasi, numerasi, dan sains, adalah jauh tertinggal dari rata-rata di dunia (OECD, 2018). Hasil PISA Indonesia menunjukkan bahwa 70% siswa memiliki kualifikasi di bawah batas minimum (Riana, 2023). Pada kemampuan literasi, siswa yang mencapai level 2 hanya sebanyak 30% saja sedangkan rata-rata siswa yang masuk level tersebut adalah 77%. Pada kemampuan numerasi, siswa yang mencapai level 2 hanya terdapat 28% dibandingkan rata-rata dunia adalah sebanyak 78%. Pada kemampuan sains, sekitar 40% siswa yang mencapai level 2 dengan rata-rata dunia adalah sebanyak 78%.

Pada studi yang kedua, yakni dilakukan oleh Innovation for Indonesia's School Children. Penelitian ini adalah penelitian untuk menilai sejauh mana kemampuan membaca dan matematika siswa Indonesia di jenjang kelas 1 hingga kelas 3 yang nantinya dibandingkan dengan standar pendidikan di Indonesia dan internasional (INOVASI, 2020). Penilaian ini dihubungkan dengan menggunakan panduan nasional dan internasional sekaligus. Panduan internasional merujuk pada Global Proficiency Framework (GRF), sedangkan panduan nasional merujuk pada Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Kurikulum 2013. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk melihat apakah kemampuan siswa sesuai

dengan berbagai standar tersebut. Hasil temuannya memperlihatkan bahwa banyak siswa di Indonesia mengalami kesulitan dalam berbagai mata pelajaran. Di mata pelajaran matematika menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kelas 2 (sekitar 84%) belum mencapai kemampuan dasar yang diperlukan. Begitu juga dengan siswa kelas 3, yang di mana sekitar dua pertiga dari mereka tidak memenuhi standar yang diharapkan. Dalam pelajaran Bahasa Indonesia, hampir 60% siswa kelas 2 belum mencapai kemampuan dasar mendengar dan memahami bacaan (Oliver Wyman, 2023).

Studi ketiga, dilakukan oleh Oliver Wyman, sebuah perusahaan konsultan manajemen di Amerika yang melakukan penelitian di Indonesia. Penelitian ini memberikan pernyataan bahwa terdapat perbedaan besar dalam kemampuan akademik antara daerah-daerah di Indonesia karena kondisi geografis dan sosial yang beragam. Hasil Asesmen nasional yang diselenggarakan pada tahun 2021/2022 menunjukkan bahwa siswa di Indonesia timur memiliki skor membaca dan berhitung yang lebih rendah dibandingkan dengan siswa di pulau Jawa, yang skornya tiga kali lebih tinggi. Ketidaksetaraan ini menunjukkan bahwa ada masalah serius dalam sistem pendidikan Indonesia (Oliver Wyman, 2023; UNESCO, 2021). Berdasarkan tiga studi bertaraf internasional tersebut, menegaskan bahwa terdapat sebuah kebutuhan yang mendesak untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia agar kesenjangan dalam pendidikan dan pembelajaran dapat diatasi

Capaian rata-rata akademik Indonesia termasuk kategori rendah dikarenakan beberapa alasan utama. Selama ini, kurikulum nasional terlalu kaku dan hanya fokus pada penguasaan materi, tanpa memperhatikan kemampuan dan kebutuhan siswa yang berbeda-beda (Rifai & Rombot, 2023). Guru sering kali lebih mementingkan menyelesaikan kurikulum daripada memastikan apakah siswa benar-benar memahami pelajaran. Hal ini membuat pembelajaran kurang menarik dan kurang menyenangkan bagi siswa. Kemudian, banyak guru kurang mampu mengajar dengan efektif, karena mereka hanya fokus pada penyampaian materi saja (Razak dkk, 2023). Akibatnya, keberhasilan siswa diukur berdasarkan penguasaan materi, bukan pada kemajuan kompetensi dasar mereka. Selain itu, Kurikulum yang seragam dan kaku menghambat peningkatan kualitas pendidikan. Sistem ini membuat kepala sekolah dan guru sulit menyesuaikan metode pembelajaran dengan

kebutuhan siswa (Rosser, 2018). Guru juga terbebani oleh tugas administratif yang rumit, sehingga kurang bisa berinovasi. Setelah otonomi daerah diterapkan, sebagian manajemen sekolah diurus oleh pemerintah pusat dan sebagian lagi oleh pemerintah daerah, yang membuat aturan menjadi lebih rumit. Pelatihan guru juga terbatas, hanya 20% guru yang mendapat pelatihan pada tahun 2019. Kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kemampuan guru juga masih kurang (UNESCO, 2021; Oliver Wyman, 2023).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperkenalkan kurikulum baru, yakni Kurikulum Merdeka, sebagai upaya untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul dan meningkatkan kualitas pendidikan. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang fleksibel dan fokus pada pemahaman mendalam, pembentukan karakter, dan pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan global. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya yang seragam dan hanya menyampaikan banyak materi, Kurikulum Merdeka menyederhanakan materi agar siswa bisa memahami konsep penting dengan lebih baik (Abidin, 2023). Guru didorong untuk menyesuaikan pengajaran dengan perkembangan siswa, dan pembelajaran berbasis proyek digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Kurikulum ini juga memberi lebih banyak wewenang kepada sekolah untuk menyesuaikan pendidikan sesuai kebutuhan mereka, sehingga mendorong inisiatif dan inovasi.

Kurikulum Merdeka sejalan dengan prinsip pendidikan Ki Hadjar Dewantara dalam beberapa aspek. Pertama, keduanya menekankan pada pembangunan karakter. Kedua, Kurikulum Merdeka didasarkan pada budaya lokal, mirip dengan gagasan Trikon dari Ki Hadjar Dewantara yang menekankan pelestarian kebudayaan (Rahayu dkk, 2023). Ketiga, keduanya fokus pada kebahagiaan dan budi pekerti siswa. Keempat, Kurikulum Merdeka menonjolkan kemandirian dan kesetaraan, sejalan dengan prinsip "*sistem among*" yang mendidik anak menjadi individu yang merdeka (Effendi dkk, 2023). Terakhir, pernyataan ini menjelaskan gagasan Ki Hadjar Dewantara tentang pentingnya kebudayaan daerah dalam membentuk kebudayaan nasional. Menurut semboyannya, "*sari-sari dan puncak-puncak kebudayaan daerah sebagai modal utama bagi terwujudnya kebudayaan nasional*," maksudnya adalah elemen-elemen terbaik dan puncak-

puncak dari berbagai kebudayaan daerah menjadi fondasi atau modal utama untuk menciptakan kebudayaan nasional yang kaya dan beragam. Jadi, kebudayaan nasional dibangun dari gabungan unsur-unsur terbaik dari berbagai kebudayaan daerah di Indonesia. Hal ini menunjukkan pentingnya budaya lokal sebagai fondasi identitas nasional, yang juga tercermin dalam Kurikulum Merdeka (Wiryopranoto dkk., 2017).

Selain capaian rata-rata akademik yang rendah, pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan berupa penurunan moralitas di kalangan pelajar melalui berbagai bentuk degradasi nilai, seperti penurunan nilai religius, etika, kemanusiaan, dan persatuan di kalangan pelajar (Kurniawan dkk, 2019). Salah satu perwujudan dari krisis moral ini dilihat dari tingginya kasus ketidakjujuran akademik seperti menyontek dan plagiarisme (Ampuni dkk, 2019; Picard & Akbar, 2019; Heriyati & Ekasari, 2020) Penelitian lain yang dilakukan oleh Sari (2022) mendukung bahwa ketidakjujuran akademik merupakan masalah signifikan di kalangan mahasiswa Indonesia, yang membutuhkan pendekatan pendidikan yang lebih integratif dan pengawasan yang ketat. Ketidakjujuran akademik ini menunjukkan rendahnya integritas dan etika dalam lingkungan pendidikan. Situasi ini diperparah oleh pandemi covid-19 yang meningkatkan tantangan dalam pendidikan moral, dengan siswa menghadapi kesulitan tambahan dalam menjaga integritas dan etika mereka selama masa-masa sulit tersebut (Fitri & Dewi, 2021).

Pendidikan karakter yang tidak merata dan kurangnya program pengembangan karakter yang terstruktur juga menambah masalah yang ada. Menurut Susilo, dkk (2022), pendidikan karakter di sekolah-sekolah Indonesia masih perlu ditingkatkan melalui program-program khusus yang mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam kurikulum sehari-hari. Masalah pendidikan karakter di Indonesia juga mencakup isu-isu sosial yang serius seperti korupsi, perkelahian antar siswa, seks bebas, narkoba, dan aborsi (Saidek dkk, 2016). Artikel oleh Hermino dan Arifin (2020) menyatakan bahwa masalah-masalah ini memerlukan solusi yang komprehensif melalui perubahan kurikulum yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mereka mengusulkan bahwa pendidikan karakter harus menjadi bagian integral dari kurikulum, dengan pendekatan yang mencakup pengajaran nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial.

Pada tahun 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memperkenalkan nilai-nilai karakter yang disebut Profil Pelajar Pancasila. Tujuannya adalah untuk memperkuat pendidikan karakter melalui Kurikulum Merdeka, yang dimana tujuan ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Profil Pelajar Pancasila juga merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), yang bertujuan mengubah cara berpikir dan bertindak masyarakat Indonesia menjadi lebih baik (Asiati & Hasanah, 2022). Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki kerugian belajar yang terjadi selama pandemi dan membentuk karakter peserta didik sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila. Profil ini adalah gambaran tentang karakter dan kemampuan yang diharapkan dari siswa, dirancang untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila. Tujuan utamanya adalah untuk menjawab pertanyaan tentang kompetensi apa yang diharapkan dari siswa di sistem pendidikan Indonesia (Hamzah dkk., 2022).. Kompetensi tersebut mencakup keterampilan, karakter, dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Profil Pelajar Pancasila memuat enam dimensi utama, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Semua dimensi ini harus diperhatikan oleh pendidik secara keseluruhan agar siswa bisa berkembang menjadi individu yang berkarakter, kompeten, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (Rachmawati dkk., 2022). Selain itu, peserta didik dapat memperkaya pengalaman belajar dan mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Implementasi Profil Pelajar Pancasila bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti menciptakan budaya sekolah yang sesuai, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan proyek khusus untuk memperkuat profil pelajar Pancasila. Tujuan utamanya adalah membentuk karakter dan mengembangkan kemampuan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara-cara ini, nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan secara efektif di sekolah (Jamaludin dkk., 2022). P5 adalah pembelajaran yang berfokus pada konteks dan interaksi dengan lingkungan sekitar, membantu siswa mengidentifikasi dan mencari solusi untuk masalah-masalah di sekitarnya. P5 berbeda dari pembelajaran di kelas yang lebih formal dan kaku. Dalam P5, siswa memiliki kesempatan belajar lebih

fleksibel dan langsung terlibat dengan lingkungan mereka untuk memperkuat kompetensinya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan beberapa tema dalam P5 dari SD hingga SMA/SMK, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila serta mengatasi isu-isu penting dalam masyarakat (Maruti dkk., 2023). Tema-tema ini meliputi Gaya Hidup Berkelanjutan, Kearifan Lokal, Bhinneka Tunggal Ika, Bangunlah Jiwa dan Raganya, Suara Demokrasi, Berekayasa dan Berteknologi untuk Membangun NKRI, Kewirausahaan, serta tema wajib untuk SMK/MAK, yaitu Kebekerjaan dan Budaya Kerja. Setiap tema ditujukan untuk mengembangkan karakter siswa, mengajarkan mereka keterampilan praktis, dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dunia kerja.

Berdasarkan panduan pengembangan Kemendikbudristek, P5 adalah pembelajaran yang memiliki berbagai macam alur pelaksanaan (Kemendikbudristek, 2021). Alur pertama itu terdiri dari tahap yaitu pengenalan, kontekstual, aksi nyata, refleksi dan tindak lanjut. Alur kedua meliputi mengamati, mendefinisikan, menggagas, memilih, merefleksikan. Alur ketiga terdiri dari temukan, bayangkan, lakukan, dan bagikan. Penelitian ini meneliti mengenai alur pertama yang terdiri dari 4 tahap. Setiap tahapan memiliki peranannya masing-masing. Pengenalan merupakan awal dari proses pembelajaran di mana materi atau konsep yang akan dipelajari diperkenalkan kepada peserta didik. Setelah tahap pengenalan, dilanjutkan dengan tahap kontekstual yang berfokus pada mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata atau pengalaman peserta didik. Tujuan dari tahap ini adalah untuk membuat materi pembelajaran lebih relevan dan mudah dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya, terdapat tahap aksi nyata, yang melibatkan peserta didik dalam melakukan tindakan atau praktik yang terkait dengan materi pembelajaran. Pada tahap ini, siswa diberi kesempatan untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang sudah mereka pelajari dalam situasi yang nyata atau dalam latihan yang mirip dengan situasi nyata. Jadi, siswa bisa mempraktikkan apa yang mereka pelajari dalam konteks yang relevan, baik itu dalam kehidupan sehari-hari atau melalui simulasi. Setelah melakukan aksi nyata, peserta didik diminta untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui tahap refleksi. Tahap terakhir dari pelaksanaan P5 adalah tindak lanjut, di mana peserta

didik dievaluasi berdasarkan pemahaman mereka terhadap materi yang telah diajarkan, kemampuan mereka dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari, serta kemajuan mereka secara keseluruhan selama proses pembelajaran. Tahap ini berfungsi sebagai penilaian akhir untuk melihat sejauh mana siswa telah belajar dan berkembang melalui pelaksanaan P5.

Menurut Riana (2023), siswa memiliki tiga peran utama yang penting dalam pembelajaran P5. Pertama, mereka harus berkomitmen kuat untuk mencapai tujuan pembelajaran, yang berarti konsisten dalam belajar dan bersedia menghadapi tantangan. Kedua, mereka harus aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran, seperti terlibat dalam diskusi, mencari sumber belajar tambahan, dan memecahkan masalah secara mandiri. Ketiga, siswa perlu memahami potensi diri mereka, sehingga mereka bisa menilai kelebihan dan kekurangan mereka untuk pengembangan diri yang lebih baik. Peran siswa dalam pembelajaran sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka tentang bagaimana pembelajaran tersebut berlangsung. Persepsi ini membentuk cara siswa merespons, terlibat, dan memahami materi yang diajarkan. Persepsi adalah kunci untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif karena melalui persepsi, siswa menafsirkan objek, peristiwa, atau informasi berdasarkan pengalaman hidup mereka (Megawanti dkk., 2020). Setiap individu memiliki persepsi yang unik yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan, struktur fisik, kebutuhan dan tujuan hidup, serta pengalaman masa lalu (Rahman dkk., 2020).

P5 menemui hambatan yang berasal dari guru dalam penerapannya di lapangan,. Masih ada anggapan bahwa P5 adalah program PPK di Kurikulum 2013, lalu guru dalam melaksanakan P5 dinilai masih kuno dan kinerja yang kurang cekatan (Asvio, dkk., 2023). Beralih kepada penelitian lain, menurut Nisa (2023), hambatan-hambatan secara keseluruhan dalam Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) dikategorikan menjadi 5 jenis, yaitu “fasilitas, tenaga pendidik, siswa, dan pemerintah”. Hambatan dari fasilitas seperti lahan yang terbatas, keterbatasan akses terhadap perangkat digital dan internet, serta keterbatasan akses dan buku paket dapat menghambat proses pembelajaran. Kondisi ini dapat mengganggu konsentrasi, akses terhadap materi pembelajaran, dan persiapan untuk pembelajaran. Kurangnya kualitas tenaga pendidik juga merupakan faktor yang

hambatan dalam proses pembelajaran. Terdapat beberapa aspek yang memengaruhi, yaitu kurangnya antusiasme dalam mengajar, kurangnya pelatihan yang memadai, serta keterbatasan wawasan guru tentang materi pelajaran. Tenaga pendidik yang tidak memiliki *soft skills* yang memadai, seperti kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan empati, dapat menghambat interaksi yang baik antara guru dan siswa, serta dapat membatasi kemampuan guru dalam menyampaikan informasi dengan efektif. Selain faktor-faktor yang berkaitan dengan fasilitas dan kualitas tenaga pendidik, karakteristik siswa juga dapat menjadi hambatan dalam proses pembelajaran. Siswa yang belum memiliki *mindset* yang terlatih untuk belajar, memiliki sikap yang kurang proaktif atau kurang percaya diri dalam menghadapi tantangan pembelajaran. Kurangnya kesatuan atau kekompakan di antara siswa juga dapat menghambat kolaborasi dan pertukaran ide. Selain itu, kurangnya dukungan dari lingkungan, baik dari keluarga maupun teman sebaya, juga dapat memengaruhi motivasi dan kinerja siswa. Peran pemerintah juga menjadi hambatan. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antara berbagai lembaga pemerintah terkait pendidikan juga menyebabkan ketidakpastian dalam Implementasi Kurikulum Merdeka. Kemudian, kurangnya alokasi anggaran untuk pelatihan dan pengembangan tenaga pendidik juga menghambat peningkatan kualitas yang mengakibatkan keterbatasan dalam pemahaman dan kurangnya keterampilan yang diperlukan. Selain itu, penelitian oleh Sukma dkk (2024) menunjukkan bahwa guru sering menghadapi kesulitan dalam menerapkan kurikulum baru karena kurangnya pelatihan dan sumber daya yang memadai. Pendidikan inklusif bagi siswa dengan kebutuhan khusus masih menghadapi hambatan signifikan dalam hal infrastruktur dan sumber daya manusia (Efendi dkk, 2022) Disparitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan merupakan tantangan lainnya. Sekolah-sekolah di daerah pedesaan sering kekurangan fasilitas, guru berkualitas, dan akses terhadap teknologi, yang mengakibatkan kesenjangan dalam pencapaian akademik dan kesempatan pendidikan bagi siswa di daerah pedesaan dibandingkan dengan mereka yang berada di perkotaan (Irianti & Prasetyoputra, 2021).

Berdasarkan observasi awal, menunjukkan bahwa SMA Pasundan Rancaekek menjadi salah satu sekolah yang ikut menerapkan P5 dengan mengambil



Tema Kewirausahaan, tepatnya di kelas X. Pelaksanaan P5 di sekolah tersebut telah diterapkan sejak satu tahun terakhir dengan rangkaian kegiatan, misal seperti *Focus Group Discussion* (FGD). Melalui FGD, guru akan memantik rasa ingin tahu siswa supaya menemukan masalah. Setelah itu, siswa diharapkan dapat mengemukakan ide-ide mereka untuk memecahkan masalah dan juga dapat mengenali dan mengembangkan minat mereka dalam bidang wirausaha. Persepsi siswa tersebut yang menentukan pembelajaran P5 telah mencapai tujuannya atau tidak.

Melalui eksplorasi terhadap hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan P5 di lapangan, maka penelitian dilakukan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi terkait pelaksanaan P5 tersebut di suatu sekolah yang sudah melakukannya, yakni SMA Pasundan Rancaekek. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji persepsi siswa sebagai salah satu bagian dari pelaksana program. Siswa dapat menilai sejauh mana pelaksanaan P5 yang telah berjalan untuk mencapai tujuan. Persepsi yang dimaksud adalah pandangan atau pendapat siswa mengenai berbagai alur pelaksanaan seperti tahap pengenalan, kontekstual, aksi nyata, refleksi, dan tindak lanjut. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan bisa membantu para pendidik dalam mendapatkan informasi mengenai persepsi siswa dalam kurikulum merdeka khususnya P5. Selain itu, hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan bagi para praktisi pendidikan, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak terkait lainnya dalam upaya meningkatkan efektivitas P5 untuk meninjau apakah P5 yang diterapkan sudah maksimal atau butuh perbaikan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti merumuskan permasalahan umum dan khusus.

### **1.2.1. Rumusan Masalah Umum:**

Bagaimana persepsi siswa terhadap pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Tema Kewirausahaan di SMA Pasundan Rancaekek?

### **1.2.2. Rumusan Masalah Khusus:**

1. Bagaimana persepsi siswa terhadap tahap pengenalan dalam P5 Tema Kewirausahaan di kelas X SMA Pasundan Rancaekek?
2. Bagaimana persepsi siswa terhadap tahap kontekstualisasi dalam P5 Tema Kewirausahaan di kelas X SMA Pasundan Rancaekek?

3. Bagaimana persepsi siswa terhadap tahap aksi nyata dalam P5 Tema Kewirausahaan di kelas X SMA Pasundan Rancaekek?
4. Bagaimana persepsi siswa terhadap tahap refleksi dan tindak lanjut dalam P5 Tema Kewirausahaan di kelas X SMA Pasundan Rancaekek?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan umum dan khusus dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian Umum:**

Menganalisis bagaimana persepsi siswa terhadap penerapan P5 Tema Kewirausahaan di SMA Pasundan Rancaekek.

#### **1.3.2. Tujuan Penelitian Khusus**

1. Mendeskripsikan persepsi siswa terhadap tahap pengenalan dalam P5 Tema Kewirausahaan di kelas X SMA Pasundan Rancaekek.
2. Mendeskripsikan persepsi siswa terhadap tahap kontekstualisasi dalam P5 Tema Kewirausahaan di kelas X SMA Pasundan Rancaekek.
3. Mendeskripsikan persepsi siswa terhadap tahap aksi nyata dalam P5 Tema Kewirausahaan di kelas X SMA Pasundan Rancaekek.
4. Mendeskripsikan persepsi siswa terhadap tahap refleksi dan tindak lanjut dalam P5 Tema Kewirausahaan di kelas X SMA Pasundan Rancaekek.

### **1.4 Manfaat Hasil Penelitian**

Berdasarkan tujuan dari yang telah dirumuskan, bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat. Berikut merupakan manfaat dari hasil penelitian secara teoritis dan praktis.

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

1. Memberikan dukungan dalam perkembangan dan pembangunan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas dalam mencapai tujuan Pendidikan Nasional.
2. Memberikan referensi pengembangan bagaimana pengimplementasian Kurikulum Merdeka dalam Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di jenjang Sekolah Menengah Atas.
3. Menjadi bahan kajian untuk peneliti selanjutnya, apabila permasalahan yang dikaji memiliki keterikatan atau kesamaan yang akan dikaji dengan

materi yang lebih mendalam, khususnya dalam bidang Teknologi Pendidikan maupun Pengembangan Kurikulum.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

##### **1. Bagi Peneliti**

Peneliti mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru dalam bidang Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, terutama tentang Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di SMA Pasundan Rancaekek.

##### **2. Bagi Pendidik**

Para tenaga pendidik dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi untuk mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) pada siswa.

##### **3. Bagi Sekolah**

Sekolah dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di SMA Pasundan Rancaekek. Informasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Kurikulum Merdeka di sekolah tersebut.